

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

#### 2.1 Kajian tentang Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kebijakan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sedangkan menurut James E. Anderson (Solichin; 2001; 2) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (Pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu:

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Proses penetapan kebijakan atau yang sering dikenal dengan *policy making process*, menurut Shafrits dan Russel dalam Daru (2008;30) yang (1) merupakan *agenda setting* dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi, (2) keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan, (3) tahap implementasi kebijakan, (4) evaluasi program dan analisa dampak (5) feedback yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan. Proses kebijakan diatas bila diterapkan akan menyerupai sebuah siklus tahapan penetapan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparatur pemerintah yang hakikatnya berupa pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat, dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

### 1.1.1 Sifat Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino (2014:9) sifat kebijakan publik sebagai bagian dari suatu kegiatan dapat dimengerti secara baik apabila dibagi-bagi dalam beberapa kategori yaitu:

1. *Policy demands* atau permintaan kebijakan, merupakan permintaan atau kebutuhan atau kalim yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi/kelompok/dengan resmi dalam system politik karena adanya masalah yang mereka rasakan.
2. *Policy decision* atau putusan kebijakan, adalah putusan yang dibuat oleh pejabat publik yang memerintahkan untuk memberi arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan.
3. *Policy statement* atau pernyataan kebijakan, adalah ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan.
4. *Policy output* atau hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik. Atau sesuatu yang sesungguhnya dikerjakan menurut keputusan dan dan pernyataan kebijakan.
5. *Policy outcomes* atau akibat dari kebijakan adalah kensekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah.

keberhasilan berkeadilan di Indonesia dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berkeadilan.

keberhasilan berkeadilan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

keberhasilan berkeadilan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

keberhasilan berkeadilan di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

keberhasilan berkeadilan di Indonesia dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berkeadilan.

keberhasilan berkeadilan di Indonesia dapat diwujudkan melalui kebijakan yang berkeadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebijakan yang dibuat spesifikasinya tidak lengkap.
2. Instansi yang ditunjuk untuk pelaksanaan kebijakan tidak cocok
3. Adanya tujuan yang saling berlawanan.
4. Insentif yang tidak memadai.
5. Ketidakjelasan arah kebijakan dengan implementasi kebijakan.
6. Keterbatasan keahlian.
7. Sumber administrasi yang tidak jelas.
8. Kegagalan komunikasi.

Menurut Grindel dalam Nogi (2003;15) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi (*content*) dan konteks (*context*) kebijakan;

a. Isi Kebijakan (*policy content*) isi kebijakan ini meliputi :

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan.
2. Bentuk manfaat yang diberikan
3. Luasnya perubahan yang diinginkan
4. Letak pembuatan keputusan yang berkaitan dengan banyaknya instansi yang terlibat dalam pembuatan keputusan implementasi kebijakan
5. Pelaksanaan program
6. Sumber daya manusia (SDM) maupun non-SDM

b. Konteks implementasi

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
2. Karakteristik kelembagaan.
3. Sikap tanggap dari para pelaksana



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya

kesesuaian antar pelaksana/penerapan kebijakan dengan desain, tujuan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau basil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi.

### 2.2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan. Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli yang dikutip dari buku Harbani Pasolong (2008:23) implementasi kebijakan menurut Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam praktik. Hinggis mendefinisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Leo Agustino (2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini prosedur kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J.O. Udoji yang dikutip oleh Leo Agustino (2014:140), pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.2.2 Faktor Keberhasilan Implementasi

Salah satu pendapat yang menjelaskan tentang keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan publik disampaikan oleh Weimer dan Aidan R. Vining dalam Harabani Pasalong, (2008:56), menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakikat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama merupakan suatu assembling produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

## 2.2.3 Penghambat Implementasi

Menurut J.A.M Marse dalam (Tangkilisan, 2004:10), ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi suatu kebijakan yaitu:

1. Isi kebijakan, yaitu suatu kebijakan dikatakan gagal karena samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki ketepatan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun eksternal dari kebijakan itu sendiri.
2. Informasi, yaitu jika terjadi kekurangan informasi maka dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil dari kebijakan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dukungan, karena sebuah kebijakan akan sangat sulit dilaksanakan jika tidak ada dukungan dan partisipasi dari semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut.
4. Pembagian potensi, yaitu pembagian potensi antara para aktor pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan deferensiasi tugas yang berwenang.

Menurut James Anderson yang diutip oleh Bambang Sugono, faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan Publik, yaitu:

- a. Adanya konsep ketidak patuhan selektif terhadap hukum, di mana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu.
- b. Karena anggota masyarakat suatu kelompok atau perkumpulan di mana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah.
- c. Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat di antara anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan cara melawan hukum.
- d. Adanya ketidak pastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang saling bertentangan satu sama lain yang menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum kebijakan publik.
- e. Apabila kebijakan di tentang dengan tajam dengan sistem nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Konsep Pengawasan

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Handoko (2012;359).

Pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. (Marnis, 2010;344) Tiga tipe pengawasan menurut Handoko (2012;361) yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*). Pengawasan pendahuluan sering disebut *steering control*, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.
2. Pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*).
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*) yaitu pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Jadi pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi. seperti di definisikan oleh Terry (dalam Zulkifli 2009;122). Bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang di rencanakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Siagian (2008;115) proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan langsung.

Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya.

2. Pengawasan tidak langsung.

yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang di sampaikan oleh para bawahan.

## 2.4 Izin Tempat Usaha

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Sjachran Basah, 1995:4)

Menurut Ateng Syarifudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan dimana hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan limitatif. Ridwan, Juniarso dan Achamad Sodik, (2009: 92)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha. Pasal 1 huruf (h) menjelaskan bahwa; Izin tempat Usaha adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Walikota untuk mendirikan atau memperluas perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan (2);

- (1) Izin Tempat Usaha berlaku untuk jangka waktu selama 5 tahun atau jangka waktu tertentu (kurang dari 5 tahun).
- (2) Izin Tempat usaha yang berlaku untuk jangka waktu, dikeluarkan atas dasar beberapa pertimbangan tertentu selain persyaratan yang telah ditetapkan.

Ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh izin tempat usaha sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1);

1. Untuk memperoleh izin tempat usaha dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan untuk itu oleh Walikota dengan dilampir :
  - a) Skema lokasi tempat usaha.
  - b) Luas tanah / bangunan tempat usaha dan atau Sertifikat / Surat tanah.
  - c) Surat izin persetujuan dari pemilik tanah/ bangunan dan atau surat perjanjian sewa-menyewa kedua belah pihak bila tanah/ bangunan tersebut bukan milik pengusaha atau pemohon.
  - d) Surat keterangan/bukti lunas/Retribusi Daerah (Fisikl Daerah) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
  - e) Gambaran bangunan/gambar kerja/bestek.
  - f) Perhitungan konstruksi dan fondasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Data mesin yang dipakai.
  - h) Jumlah tenaga kerja.
  - i) Study Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan usah Pemantauan Lingkungan (LPL) bila diperlukan menurut peraturan yang berlaku.
  - j) Memiliki racun api, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran.
- Syarat-Syarat untuk memperoleh Surat Izin Usaha.

1. Foto Copy KTP pemilik usaha.
2. Pas Photo 3 x 4 Berwarna sebanyak 3 lembar.
3. Surat Permohonan Penyelenggaraan Warnet
4. Surat Keterangan Asosiasi Warnet.
5. Foto tempat usaha Warnet.
6. Denah Lokasi tempat usaha Warnet

#### Syarat Teknis

- a. Survey Lokasi Tempat Usaha Warung Internet.

Dan lama pengurusan surat izin usaha diperkirakan selama 5 hari.

#### 2.5 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha menyatakan bahwa:

(Pada pasal 2)

“Setiap pengusaha yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya diwajibkan memiliki izin usaha”

(Pada pasal 3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kewajiban memiliki izin tempat usaha sebagaimana maksud pasal 2 peraturan daerah ini adalah bagi pengusaha yang menggunakan tempat usaha baik untuk kepentingan usaha jenis HO (Hinder Ordonantie) maupun jenis non HO.
2. Usaha-usaha yang tergolong dalam jenis HO sebagaimana dimaksud ayat 10 pasal ini : usaha-usaha yang tergolong kedalam jenis usaha yang diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia seperti, hotel, biro perjalanan, rental, restoran, rumah makan dan objek wisata.

Adapun ketentuan persyaratan dan tata cara memperoleh izin tempat usaha :

Untuk memperoleh izin tempat usaha dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis menurut formulir dan daftar isian yang telah ditetapkan untuk itu oleh walikota dengan dilampir:

1. Skema lokasi tempat usaha
2. Luas tanah/bangunan tempat usaha/surat tanah
3. Surat izin persetujuan dari pemilik tanah/surat perjanjian menyewa
4. Surat keterangan/bukti lunas/ retribusi daerah yang dikeluarkan oleh dinas pendapatan daerah
5. Gambaran Bnagunan
6. Perhitungan kontruksi dan fondasi
7. Data mesin yang diapaki
8. Jumlah tenaga kerja
9. Study analisis mengenai dampak lingkungan (AMDA) dan atau usaha pengelolaan lingkungan ( UKL) bila diperlukan menurut peraturan yang berlaku



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Memiliki racun api yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas pemadam kebakaran
11. Bagi usaha yang tergolong non HO , pemohonnya cukup dilampiri huruf a,b,c.d dan j.

## 2.6 Kebijakan dalam Pandangan Islam

Islam menjadi kompas bagi kehidupan umat manusia dalam menjalankan kehidupan disegala aspek kehidupan seperti agama, ekonomi, sosial budaya, politik pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kelengkapan ajarannya telah mendorong manusia bergerak menuju pertumbuhan dan pembangunan intelektual dan kultural, sumber ajarannya berasal dari Al-Quran dan Hadits.

Begitu juga dalam hal kebijakan pemerintah tidak akan pernah terlepas dari islam. Jauh sebelum ilmuwan barat mengutarakan teori-teori seputar kebijakan pemerintah ini. Al-Quran dan Hadits telah membicarakan hal itu, semua telah tertuang di dalamnya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mau atau tidak mengikutinya.

Perhatian utama kepemimpinan adalah kebijaksanaan pemerintah, yaitu apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan atau tidak mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini sangat penting untuk mengatasi keadaan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Karena masyarakat bukan hanya menilai apa yang dilaksanakan pemerintah saja tetapi juga apa yang tidak dilaksanakan.

Kebijakan itu merupakan pengambilan keputusan kebijakan, yaitu memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah. Disamping itu, Al-Qur'an juga menyoroti mengenai kebijakan pemerintah. Allah menyuruh berlaku

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adil walaupun terhadap saudara dan kerabat sendiri oleh karenanya, pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakannya dituntut berlaku seadil-adilnya, tanpa ada unsur kepentingan pribadi maupun golongan. Pada hakikatnya semua yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah hendaknya semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, surat an-Nisa'/4 ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ؕ أَوِ  
ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُوْلَىٰ بِهِمَا ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوًىٰ ۖ أَن  
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تُعَرِّضُوا فإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas kita dapat mengetahui bahwa islam menghendaki agar dalam pembuatan suatu kebijakan didasari oleh asas keadilan dan kebijakan yang dibuat tersebut haruslah memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Selain daripada itu kebijakan yang dihasilkan harus memiliki dasar yang jelas dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

1. Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Warnet di Kota Pekanbaru (Studi Kasus : Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Tahun 2012-2014). Penelitian ini merupakan penelitian milik saudara Harry

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nova Satria, Mahasiswa Universitas Riau, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, penelitian ini dilakukan pada tahun 2015 dan memfokuskan penelitian di bidang penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana warung internet di kota Pekanbaru memberikan kontribusi kepada kota Pekanbaru di bidang penerimaan pajak daerah dan juga untuk mengetahui sejauh mana respon pemerintah terhadap fenomena warung internet di kota Pekanbaru. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: peraturan pemerintah No 5 Tahun 2011 tentang pajak hiburan merupakan bentuk kebijakan pemerintah untuk membuat aturan bagi pengusaha warung internet yang ada di kota Pekanbaru secara administrasi dengan adanya perda ini akan mengoptimalkan pendapatan daerah dari pajak hiburan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah:

- a. Penelitian saya berdasarkan Peraturan daerah kota Pekanbaru No 7 tahun 2000 sedangkan landasan hukum penelitian terdahulu adalah Peraturan Daerah kota Pekanbaru No 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
  - b. Penelitian saya dilakukan di Seluruh Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan.
2. Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Terhadap Warung Internet di Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan hasil dari karya saudara Rio Naldo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putraperdana mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sejauh mana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam hal ini yaitu dinas perhubungan komunikasi dan informatika, terkait pengolahan data elektronik di warung-warung internet di Kota Pekanbaru, kemudian untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Dishub Kominfo dalam melakukan pengawasa. Dalam analisis yang di lakukan di dalam penelitian ini ditemukan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru khususnya kecamatan Tampan masih dalam kategori yang kurang baik.

Perbedaan Penelitian saya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Saya meneliti tentang Penertiban warung internet (*warnet*) yang tidak memiliki izin usaha di kecamatan tampan kota Pekanbaru, sedangkan penelitian di atas membahas tentang penertiban warung internet (*warnet*) yang menyalah gunakan data elektronik untuk mengakses konten konten terlarang, seperti pornografi, perjudian, dan hal hal lain.
- b. Saya meneliti pada tahun 2016 sementara penelitian di atas melakukan penelitian rentan waktu 2014-2015.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Implementasi Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2000 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Pada Mahasiswa Di Kota Pekanbaru). Penelitian ini merupakan jurnal dari dosen UIR Pekanbaru yaitu Sri Maulidia S.Sos, Drs. Rahyunir Rauf, M.Si, dan yendri Nazir S.Sos. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2008 tentang administrasi kependudukan (studi kasus kepemilikan kartu tanda penduduk pada mahasiswa di kota pekanbaru). (Maulidia Sri, dkk, juli 2010, "Implementasi Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2000 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Pada Mahasiswa Di Kota Pekanbaru)", R.Rauf, Vol. 5 No.2 *jurnal.uir.ac.id/index.php/JIS/article/download/250/196*, 10 juli 2010.)

### 2.8 Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalahan pahaman penafsiran dalam penelitian ini, maka sebelumnya penulis akan mengoperasionalkan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
2. Implementasi adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

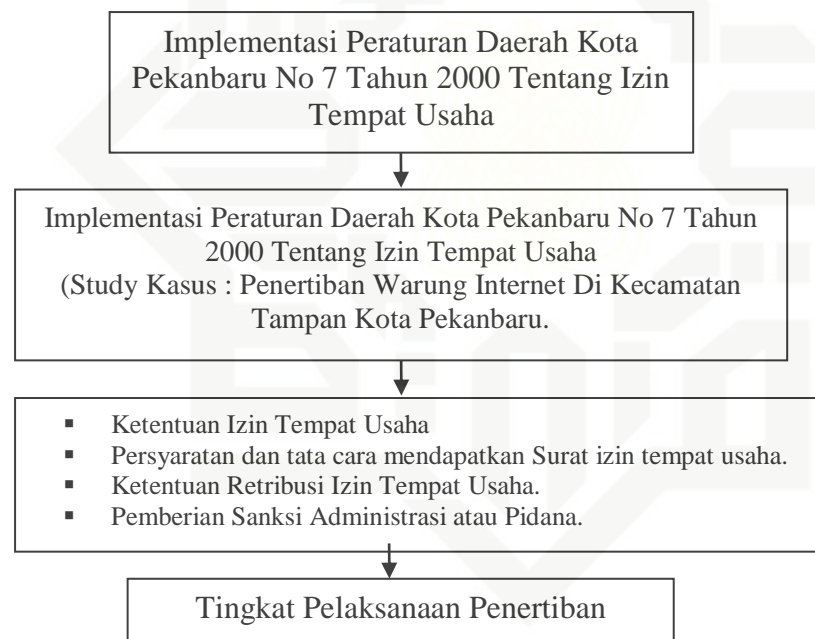
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut sebagai kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

3. Hambatan implementasi kebijakan ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya adalah isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.
4. Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

### 2.9 Kerangka Pemikiran



Sumber : Peraturan daerah kota Pekanbaru no 7 tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha.

### 2.10 Konsep Operasional

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Sugiono, (2005:38).

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.1 : Konsep Operasional Variabel Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha.**

No	Variabel Penelitian	Indikator	Sub Indikator
1	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha	Ketentuan Izin Tempat Usaha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Sosialisasi terkait kebijakan Peraturan daerah kota Pekanbaru no 7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha.</li> <li>2. Melakukan Peninjauan Ulang Terhadap Data-data Mengenai Izin Usaha Warung Internet di Kecamatan Tampan.</li> <li>3. Izin Tempat Usaha Berlaku Untuk Jangka Waktu Selama 5 Tahun atau Jangka Waktu Tertentu (Kurang Dari 5 Tahun)</li> <li>4. Melakukan Pemeriksaan Tahunan Terhadap Setiap Izin Usaha</li> </ol>
		Persyaratan Dan Tata Cara Memperoleh Izin Tempat Usaha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan tata cara dan persyaratan perizinan kepada masyarakat yang sesuai dengan peraturan daerah kota Pekanbaru no 7 tahun 2000 tentang izin tempat usaha.</li> <li>2. Melakukan Peninjauan langsung kelapangan terkait pengurusan Surat Izin Tempat Usaha.</li> <li>3. Pelaku usaha Mengajukan Permohonan Tertulis Menurut Formulir dan Daftar Isian yang telah Di tetapkan.</li> <li>4. Melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau Usaha Pengelolaan Lingkungan atau Usaha Pemantauan Lingkungan.</li> </ol>
		Ketentuan Restribusi Izin Tempat Usaha.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Peninjauan lokasi tempat usaha sebelum pengukuran dilaksanakan.</li> <li>2. Melakukan pengukuran tempat usaha.</li> <li>3. Menetapkan Besaran Uang Retribusi Izin Tempat Usaha.</li> <li>4. Menjelaskan kepada pelaku usaha mengenai penetapan jumlah uang retribusi yang harus di bayarkan.</li> </ol>
		Pemberian Sanksi Administrasi atau Pidana.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Razia atau sidak pada usaha warung internet di kecamatan tampan kota Pekanbaru.</li> <li>2. Pemberian Sanksi Administrasi kepada pelaku usaha.</li> <li>3. Pemberian Sanksi Pidana kepada pelaku usaha yang terbukti tidak memiliki izin usaha.</li> <li>4. Memberikan hukuman berupa denda kepada pihak tempat usaha yang terlambat dalam melakukan pengurusan administrasi (Pendaftaran) izin tempat usaha.</li> </ol>

Sumber: Peraturan daerah kota Pekanbaru no 7 tahun 2000 tentang Izin Tempat Usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.11 Teknik Pengukuran

Untuk menjaga agar penelitian dapat mencapai tujuan yang diharapkan maka penulis menetapkan konsep operasional yang digunakan untuk mengukur indikator penelitian dengan skala *Likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat dan persepsi seseorang terhadap fenomena sosial yang disebut variabel penelitian. Adapun variabel penelitian adalah tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha.

Dalam penentuan kriteria penulis menggunakan teori Hartono (2006:30) yaitu, penilaian dilakukan pengelompokkan menjadi lima kriteria yaitu: Sangat setuju, setuju, Cukup setuju, Kurang setuju dan Tidak setuju.

Indikator yang akan diajukan kepada responden dengan menggunakan tehnik pengukuran tersebut, maka dalam penentuan hasil penelitian akan dapat diambil kesimpulan dengan baik mengenai, Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (*Studi : Penertiban Izin Tempat Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*).serta faktor-faktor yang menghambat implementasinya.